



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ISTIANA WINDU KARTIKA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
3. NHK : **258959**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.068.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 2.750 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/166 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. Tanah Seluas 3.825 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 3.840 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 221.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 38.902.299**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.328.402.299
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.328.402.299

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.